

ANALISIS TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI INTERNET SAAT PANDEMI COVID-19

Khafid Fitriyanto Albahrudin¹, Hendrawan Santosa Putra², Oktaviani Ari
Wardhaningrum^{3*}

^{1,2,3}Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No 37 Jember, Indonesia

*Korespondensi: oktaviani.arw@unej.ac.id

Abstract

Transparency is an important pillar of government accountability. A transparent government is a government that is accountable and provides information to the public regarding its strategy, plans and performance. This study aims to analyze the effect of audit opinion, independence ratio, and government size on internet financial reporting during the Covid-19 pandemic. The research sample consists of 88 district/city governments in the Java Island region for 2020-2021, using cluster sampling and logistic regression analysis. The results of this study indicate that the independence ratio has an effect on internet financial reporting during the Covid-19 pandemic, while audit opinions and size government have no effect on internet financial reporting during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *audit opinion, independence ratio, size government*

Abstrak

Transparansi menjadi pilar penting dari akuntabilitas pemerintah. Pemerintah yang transparan merupakan pemerintah yang akuntabel dan memberikan informasi kepada publik terkait strategi, rencana, dan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, rasio independensi, dan ukuran pemerintah terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet (*internet financial reporting*) saat pandemi Covid-19. Sampel penelitian ini terdiri dari 88 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa tahun 2020-2021, dengan menggunakan *cluster sampling* dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio independensi berpengaruh terhadap *internet financial reporting* saat pandemi Covid-19, sedangkan opini audit dan ukuran pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap *internet financial reporting* saat pandemi Covid-19.

Kata kunci: opini audit, rasio independensi, ukuran pemerintah

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 membuat transformasi internet atau teknologi digital menjadi lebih cepat. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate menyatakan Indonesia telah memasuki era yang dinamakan kedaulatan digital (iNews.id, 2022). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akibat pandemi Covid-19 kemudian mendorong digitalisasi berkembang semakin pesat. Dilansir dari situs BPS.go.id (2021), penggunaan internet oleh rumah tangga di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 78,18%. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah tersebut sejalan dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah. Berbagai aktivitas mulai dari bekerja, belajar, belanja, dan aktivitas lainnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pengguna internet yang semakin banyak kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, tingkat transparansi publik di Indonesia masih dikatakan kurang. Kurangnya transparansi sering dikaitkan dengan korupsi di sektor pemerintahan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Berdasarkan laporan Corruption Perceptions Index 2021 menempatkan Indonesia berada pada posisi 96 dari 180 negara (Transparency.org, 2022) Hal tersebut kemudian dapat memberikan pengaruh atas krisis kepercayaan publik kepada kinerja pemerintah.

Transparansi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan *good governance* atas pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan transparansi sendiri dapat dilihat dari tersedianya informasi dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut (Annisa & Murtini, 2018). Semakin mudah masyarakat dalam memperoleh informasi akan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. Di sisi lain kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin dirasakan seiring berkurangnya transparansi (Yusuf & Jordan, 2015).

Pada level daerah, pengoptimalan transparansi informasi keuangan daerah menjadi upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menunjukkan kinerjanya. Pengungkapan laporan keuangan di internet atau *Internet Financial Reporting* (IFR) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016). Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia telah menerbitkan UU No.14 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) (2008). Pada pasal 9 ayat (4) UU KIP dinyatakan bahwa informasi publik kepada masyarakat disampaikan dengan cara atau media yang mudah dan dapat dipahami. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 tentang sistem informasi keuangan daerah (2005), pasal 13 menyebutkan bahwa penyajian informasi keuangan daerah dilakukan melalui situs resmi masing-masing pemerintah daerah. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur penyelenggaraan transparansi informasi keuangan daerah melalui situs atau *website* resmi, namun pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela.

Keterbukaan informasi kepada publik masih menjadi tantangan pemerintah sampai saat ini. Kebijakan-kebijakan keuangan daerah yang dibuat harus dapat diketahui dan diawasi oleh publik Akses informasi secara terbuka dapat memfasilitasi publik untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan pada masing-masing *website* resminya.

Opini audit menjadi salah satu indikator atas kualitas laporan keuangan. Kinerja pemerintah yang baik dapat tercermin dari kualitas laporan keuangan yang akuntabel. Laporan keuangan yang telah diperiksa kewajarannya oleh BPK dapat ditunjukkan kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi. Hasil opini yang semakin baik diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan mereka. Pemerintah daerah akan cenderung menghindari publikasi laporan keuangannya apabila mendapatkan opini yang tidak kredibel. Penelitian Nor *et al.* (2019), menyatakan

ketidakadaan laporan keuangan pada situs *website* cenderung memiliki hasil audit yang buruk.

Rasio independensi atau tingkat kemandirian merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah menjadi cerminan atas kemampuan suatu daerah yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perolehan PAD yang tinggi tentunya dapat menjadi dorongan pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerjanya. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja atau kemampuan yang buruk akan lebih membatasi akses informasi kepada publik (Adriana & Ritonga, 2018).

Di sisi lain ukuran pemerintah menjadi indikator besar kecilnya suatu daerah yang dicerminkan dengan jumlah asetnya. Semakin besar aset yang dimiliki menunjukkan semakin besar pula ukuran pemerintah daerah tersebut. Kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah tentunya perlu dilakukan suatu pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah yang memiliki ukuran besar tentunya membutuhkan banyak pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan yang lebih ketat memaksa pemerintah daerah menggunakan internet dalam rangka transparansi dan akuntabilitas (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Pada saat kondisi pandemi *covid-19*, pembatasan segala aktivitas membuat auditor menghadapi tantangan yang lebih berat untuk melaksanakan prosedur audit. Hal tersebut dikarenakan auditor tidak bisa secara langsung datang pada daerah yang masuk pada kategori atau zona berisiko tinggi. Kondisi tersebut membuat risiko terjadinya kecurangan akan semakin sulit untuk dideteksi. Sementara itu, adanya *refocusing* dan realokasi anggaran membuat pemerintah berupaya untuk menata kembali perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Penelitian terdahulu telah mencoba menilai transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Penelitian Yuniarta & Purnamawati (2020), menunjukkan bahwa elemen kunci yang dicerminkan oleh ukuran pemerintah daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap implementasi pelaporan keuangan di internet, sedangkan opini audit tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Nor *et al.* (2019) serta Dewi & Adi (2019), menyebutkan opini audit berpengaruh positif signifikan. Sementara itu, penelitian Dewi & Purwanto (2022), menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap informasi keuangan. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan penelitian Adiputra *et al.* (2018), bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi transparansi.

Wilayah Pulau Jawa masih mendominasi persebaran akses internet di Indonesia. Dilansir dari Cnnindonesia.com (2021), survei yang oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa Pulau Jawa menyumbang 41% dari total penggunaan internet di Indonesia. Sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Pulau Jawa juga menjadi pusat perekonomian dan pembangunan. Tingkat penyebaran kasus *Covid-19* yang tinggi di Pulau Jawa membuat pengawasan atas aktivitas pemerintah lebih terfokus pada wilayah ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana jenis penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka. Menurut Sugiyono (2013;7), penelitian kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang dilandaskan pada data konkrit. Penelitian dilakukan menggunakan data statistik sebagai alat uji guna perhitungan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian diambil kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki kabupaten dan kota administrasi. Wilayah administrasi berada dalam wewenang pemerintah provinsi, artinya wilayah tersebut tidak berstatus sebagai daerah otonom. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 113 pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun

besar sampel sejumlah 88 pemerintah kabupaten/kota. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel penelitian ini adalah metode *cluster sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi beberapa klaster. Sampel diambil dari setiap klaster yang dipilih secara acak atau random. Kemudian dianalisis menggunakan metode regresi logistik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang digunakan merupakan neraca terkait dengan total aset, laporan realisasi anggaran, dan ikhtisar hasil semester kedua tahun 2020 dan 2021 terkait opini audit. Perolehan data terkait laporan realisasi anggaran dilakukan dengan cara mengakses situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, djpk.kemenkeu.go.id. Data neraca bersumber dari LKPD yang diperoleh melalui layanan publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), e-ppid.bpk.go.id. Data opini audit diperoleh dengan menelusuri situs web Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bpk.go.id. Sementara itu, data variabel pada penelitian ini adalah IFR yang didapat dari penelusuran website resmi masing-masing pemerintah daerah. Berikut ringkasan operasional variabel penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Operasional Variabel

No.	Variabel	Konsep	Definisi Operasional
1.	<i>Internet financial reporting.</i>	Bentuk pemanfaatan media internet melalui <i>website</i> untuk mengungkapkan informasi atas kinerja keuangan pemerintah.	Jika Pemda mempublikasikan laporan keuangan daerah secara lengkap maka diberi angka 1, sementara itu bagi Pemda yang tidak menyediakan informasi laporan keuangan daerah atau tidak lengkap maka diberi angka 0.
2.	Opini audit	Opini audit merupakan pendapat auditor atas kewajaran suatu laporan keuangan	Tidak memberikan Pendapat = 1 Tidak Wajar = 2 Wajar Dengan Pengecualian = 3 Wajar Tanpa Pengecualian = 4
3.	Rasio Independensi	Mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan atau aktivitasnya secara mandiri.	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}}$
4.	Ukuran Pemerintah	Semakin besar aset yang dimiliki menunjukkan semakin besar pula ukuran Pemda tersebut.	\ln Total aset

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan pada penelitian ini untuk memberikan gambaran atau pendeskripsian terhadap variabel-variabel yang digunakan tanpa bermaksud menggeneralisasikan sampel terhadap populasi. Metode tersebut bertujuan untuk

memudahkan dalam melakukan pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan data yang kemudian menghasilkan ukuran statistik. Data yang disajikan memuat nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Berikut hasil perhitungan analisis statistik deskriptif.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	176	2,00	4,00	3,9700	0,21100
Rasio Independensi	176	0,06	1,18	0,3055	0,22248
Ukuran Pemerintah	176	28,10	31,41	29,1643	0,61664
Internet Financial Reporting	176	0,00	1,00	0,6100	0,48800

Sumber: Data diolah, 2023

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Text*)

Uji ini bertujuan untuk menilai kelayakan dari model regresi menggunakan *Hosmer Lemeshow's goodness of fit test*. Data dikatakan tidak baik jika nilai yang dihasilkan sama dengan atau kurang dari 0,05. Uji *Hosmer Lemeshow's goodness of fit test* diukur menggunakan nilai *chi-square*.

Tabel 3. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,036	8	0,430

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hasil uji *chi-square* hitung diperoleh nilai 8,036. Nilai sig. 0,430 > 0,05. Hal tersebut mengartikan model sesuai dengan nilai observasinya atau model telah cukup menjelaskan data (*goodness of fit*).

Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui *fit* atau tidaknya model yang telah dihipotesiskan menggunakan fungsi *Likelihood*. Model regresi dikatakan baik jika terjadi penurunan nilai *Likelihood* dengan membandingkan antara *-2 Log Likelihood* pada awal dan akhir.

Tabel 4. Uji Overall Model Fit

<i>-2 Log Likelihood</i> <i>Block Number = 0</i>	<i>-2 Log Likelihood</i> <i>Block Number = 1</i>
234,817	230,181

Sumber: Data diolah, 2023

Angka pada awal *-2 Log Likelihood Block Number = 0* sebesar 234,817 dan pada *-2 Log Likelihood Block Number = 1* sebesar 230,181. Nilai pada awal lebih besar dibandingkan nilai pada akhir. Hal tersebut mengartikan bahwa secara keseluruhan model regresi yang digunakan dikatakan baik atau model dihipotesiskan *fit* dengan data.

Uji Regresi Logistik

Dari hasil uji prasyarat yang telah dilakukan sebelumnya, maka untuk selanjutnya dilakukan analisis mengenai model persamaan regresi dari variabel independen yang terdiri atas Opini Audit (X_1), Rasio Independensi (X_2), dan Ukuran Pemerintah (X_3) terhadap variabel dependen yaitu *Internet Financial Reporting* (Y) yang tercermin dari persamaan regresi logistik. Adapun berikut hasil dari persamaan regresi logistik yang terbentuk dari hasil penelitian:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Logistik

Variabel Independen	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (B)
Opini Audit	-0,079	0,766	0,010	1	0,919	0,924
Rasio Independensi	-2,002	0,988	4,103	1	0,043	0,135
Ukuran Pemerintah	0,655	0,368	3,175	1	0,075	1,925
Constant	-17,702	11,194	2,501	1	0,114	0,000

Sumber: Data diolah, 2023

Melalui hasil *output* koefisien menggunakan *software* SPSS v.29 yang tersedia pada tabel 5, maka dapat ditarik model persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\ln(p/(1-p)) = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$\ln(p/(1-p)) = - 17,702 - 0,079OA - 2,002RI + 0,655SG + e$$

Keterangan:

$\ln(p/(1-p))$ = Pengungkapan laporan keuangan daerah di *website*;

α = Konstanta;

β_{1-3} = Koefisien;

X_1 = Opini Audit;

X_2 = Rasio Independensi;

X_3 = Ukuran Pemerintah;

e = *error*.

Pembahasan

Pengaruh Opini Audit Terhadap *Internet Financial Reporting*

Opini audit merupakan indikator atas kualitas laporan keuangan berupa pendapat terkait kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Pendapat tersebut merupakan informasi utama dari laporan audit yang harus menyertakan opini. Pada sektor pemerintahan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat jenis opini audit yang dikeluarkan BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Hasil pengujian hipotesis pada opini audit dari tahun 2020 hingga 2021 diperoleh nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang telah dirumuskan ditolak. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara opini audit terhadap internet financial reporting pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa saat terjadinya pandemi Covid-19.

Keterbatasan dalam menjalankan prosedur audit menjadi tantangan bagi para auditor. Situasi pandemi Covid-19 membuat pemeriksaan yang dilakukan dimungkinkan tidak dilakukan secara langsung. Hal tersebut memperhatikan kondisi atau status dari daerah yang dilakukan pemeriksaan. Prosedur alternatif lain seperti audit jarak jauh kemudian dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan sesuai dengan pedoman audit. Meskipun demikian, risiko kecurangan menjadi lebih sulit untuk terdeteksi saat pandemi.

Pada saat pandemi Covid-19 sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Jawa berhasil untuk mempertahankan opini WTP. Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DI. Yogyakarta tetap memperoleh opini WTP dari 2020-2021. Beberapa kabupaten di Jawa Barat, seperti Indramayu dan Bandung Barat naik dari opini WDP. Pada Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember juga berhasil naik dari opini TW yang diperoleh pada tahun 2020. Hasil opini yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang disajikan semakin baik. Meskipun demikian, opini yang didapatkan tidak serta merta memberikan pengaruh kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan transparansi laporan keuangannya di website resminya.

Pada hubungan teori keagenan, pemerintah berupaya untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan atau kinerja yang telah dilakukan. Opini yang didapatkan oleh pemerintah menjadi upaya mekanisme yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemerintah yang memiliki otoritas untuk bertindak atas dasar kepentingan masyarakat. Peraturan pemerintah No. 56 tahun 2005 mengenai informasi keuangan daerah menyebutkan

bahwa penyajian informasi keuangan daerah dilakukan melalui situs resmi pemerintah daerah. Adanya peraturan tersebut juga membuat pemerintah daerah mau tidak mau berusaha untuk menampilkan informasi keuangan daerah pada situs resminya.

Sejalan dengan penelitian Yuniarta & Purnamawati (2020), menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan di internet. Penelitian (Saraswati *et al.* 2019), juga mengatakan tidak terdapat pengaruh antara opini audit terhadap publikasi di internet. Hal ini menunjukkan bahwasanya opini yang semakin baik tidak mempengaruhi transparansi keuangan pemerintah daerah di website resminya.

Pengaruh Rasio Independensi Terhadap *Internet Financial Reporting*

Rasio independensi atau disebut juga dengan tingkat kemandirian merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai segala aktifitas pemerintahannya. Perolehan rasio tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan transfer. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian menunjukkan semakin berkurangnya ketergantungan atau campur tangan dari bantuan pemerintah pusat atau pihak lain yang berhubungan.

Hasil pengujian hipotesis pada rasio independensi dari tahun 2020 hingga 2021 diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang telah dirumuskan diterima. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh antara rasio independensi terhadap internet financial reporting pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa saat terjadinya pandemi Covid-19.

Pada masa awal pandemi Covid-19 realisasi PAD pada seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan. Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menyatakan bahwa sebanyak 530 daerah di Indonesia mengalami penurunan pendapatan sebesar 15,81% (Tirto.id, 2020). Kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah serta dana desa turut memberikan pengaruh terhadap penurunan pendapatan. Meskipun demikian, pada tahun 2021 realisasi PAD untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut seiring dengan laju pemulihan ekonomi yang semakin menguat.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yaitu bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menggali sumber-sumber PAD yang didukung dengan kebijakan-kebijakan perimbangan pusat serta daerah. Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi menjadi salah satu komponen utama atas pendapatan. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi tentunya ingin menunjukkan kepada para stakeholder atas keberhasilan dari hasil kinerjanya. Disamping itu, ketergantungan yang masih tinggi membuat pemerintah akan lebih memonitor kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan transparansi laporan keuangan kepada publik.

Hasil yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kemandirian dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi transparansi keuangan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuniarta & Purnamawati (2020), bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan di internet. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wicaksono & Prabowo (2016), menyatakan bahwa tingkat kemandirian memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya ketergantungan yang masih tinggi maka memungkinkan tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota semakin besar.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap *Internet Financial Reporting*

Ukuran Pemerintah atau disebut juga dengan ukuran pemerintah merupakan indikator untuk mengetahui besar kecilnya pemerintah daerah yang salah satunya dicerminkan oleh jumlah asetnya. Semakin besar aset yang dimiliki mengindikasikan semakin besar juga ukuran pemerintah tersebut. Kepemilikan aset yang besar dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, pemerintah yang memiliki skala ukuran yang besar juga tentunya membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban.

Hasil pengujian hipotesis pada ukuran pemerintah daerah 2020 hingga 2021 diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang telah dirumuskan ditolak. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah terhadap internet financial reporting pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa saat terjadinya pandemi Covid-19.

Perhitungan yang dilakukan secara deskriptif menyatakan bahwa nilai rata-rata ukuran pemerintah relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan minimum. Artinya, rata-rata ukuran pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang dilihat dari jumlah asetnya menunjukkan skala yang relatif kecil. Selain itu, pemanfaatan aset yang belum maksimal masih menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah daerah. Permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara yang sebagian tersebar dari aset daerah yaitu belum tercatat dan dilaporkan dengan baik. Hal tersebut kemudian dapat menimbulkan permasalahan saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pada saat situasi pandemi Covid-19 besaran angka aset pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa relatif mengalami kenaikan. Adanya dukungan pemimpin daerah untuk terus meningkatkan aset daerah meskipun di tengah situasi pandemi memberikan pengaruh pada kenaikan tersebut.

Pada teori keagenan, ketersediaan informasi keuangan pemerintah daerah menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi kepada masyarakat. Kekayaan pemerintah daerah tentunya perlu dilakukan suatu pengawasan. Meskipun besarnya aset tidak memberikan pengaruh terhadap publikasi keuangan daerah di situs resminya, pemerintah harus tetap memenuhi tuntutan transparansi kepada publik. Hal tersebut menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adiputra *et al.* (2018), menyatakan tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian Annisa & Murtini (2018), juga menyatakan ukuran pemerintah tidak mempengaruhi pemerintah daerah di Pulau Jawa baik dari segi transparansi maupun aksesibilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa tidak serta merta mempengaruhi implementasi transparansi keuangan daerah pada website resminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Tidak terdapat pengaruh antara opini audit (X1) terhadap internet financial reporting (Y), artinya hasil opini yang semakin baik tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan transparansi keuangan daerah kepada publik melalui website resminya.
2. Terdapat pengaruh antara rasio independensi (X2) terhadap internet financial reporting (Y), artinya tingkat kemandirian yang masih rendah, maka akan mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan transparansi keuangan daerah kepada publik melalui website resminya.
3. Tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah (X3) terhadap internet financial reporting (Y), artinya besar kecilnya pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah asetnya tidak mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan transparansi keuangan daerah kepada publik melalui website resminya.

KETERBATASAN DAN SARAN

Adapun keterbatasan dan saran pada penelitian ini yang kemudian dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya meliputi hal-hal berikut:

1. Perolehan data variabel *internet financial reporting* tidak dilakukan secara seragam. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dalam melakukan publikasi laporan keuangannya tidak hanya dilakukan melalui halaman utama website resminya. Peneliti selanjutnya

diharapkan menggunakan sumber data yang seragam untuk perolehan data variabel *internet financial reporting*.

2. Perolehan data neraca untuk variabel ukuran pemerintah membutuhkan waktu yang tidak pasti. Hal ini disebabkan dibutuhkan pengajuan permohonan informasi kepada PPID BPK RI. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan estimasi waktu untuk memperoleh data neraca yang digunakan pada variabel ukuran pemerintah.
3. Rentang waktu untuk data saat kondisi pandemi covid-19 pada penelitian ini hanya 2 tahun, yaitu 2020-2021. Hal ini disebabkan beberapa data untuk tahun selanjutnya belum tersedia. Peneliti selanjutnya diharapkan membandingkan kondisi sebelum pandemi covid-19 dengan kondisi setelah pandemi covid-19.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123-138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>.
- Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 13-26. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12558>.
- Annisa, R., & Murtini, H. (2018). Accounting Analysis Journal The Determinant of Regional Financial Information Transparency on the Official Website of Local Government. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 43-51. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i3.18213>.
- BPS.go.id. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*. <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020>.
- Cnnindonesia.com. (2021). *Pengguna Internet Indonesia Masih Didominasi di Jawa*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210901114436-185-688266/pengguna-internet-indonesia-masih-didominasi-di-jawa>.
- Dewi, S. A. N. K., & Purwanto, A. (2022). Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas LKPD, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah K. Diponegoro). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 710-721. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 358. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21322>.
- iNews.id. (2022). *Efek Pandemi, Pengguna Internet Indonesia Tumbuh Signifikan*. <https://www.inews.id/techno/internet/efek-pandemi-pengguna-internet-indonesia-tumbuh-signifikan>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (2008). *UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008)*.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112-128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>.
- Nosihana & Yaya. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89-104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>.
- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudiby, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 85-101. <https://doi.org/10.18196/rab.030138>.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Tirto.id. (2020). *PAD Menyusut Akibat COVID-19, Bagaimana Pemda Menyiasatinya?* Tirto.Id.

- <https://tirto.id/pad-menyusut-akibat-covid-19-bagaimana-pemda-menyiasatinya-fQD2>
Transparency.org. (n.d.). *2021 Corruption Perceptions Index - Explore the... - Transparency.org*. Retrieved October 12, 2022, from <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>
- Wicaksono, D., & Prabowo, A. (2016). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd114) Melalui Internet (Iflgr) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi*, 16(1), 114. <https://doi.org/10.30595/medek.v16i1.1278>.
- Yuniarta, G. A., & Gusti Ayu Purnamawati, I. (2020). Key elements of local government transparency in new public governance. *Problems and Perspectives in Management*, 18(4), 96-106. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(4\).2020.09](https://doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.09).
- Yusuf & Jordan. (2015). Popular Financial Reports: Tools for Transparency, Accountability and Citizen Engagement. *YusufThe Daily Independent*, 64(1), 12-17. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.